

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM SISTEM PENANGGULANGAN  
BENCANA DI INDONESIA: STUDI KASUS ANALISIS IMPLEMENTASI  
RENSTRA BPBD KABUPATEN SLEMAN DI DESA KEPUHARJO  
KECAMATAN CANGKRINGAN

Nala Nourma Nastiti, Titik Firawati,  
Eric Hieriej Atin Prabandari

Abstrak

*Bencana dapat memberikan pengaruh dan dampak gender yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Selain dampak korban jiwa dan kerusakan, bencana dapat menjadi kesempatan memperbaiki struktur relasi sosial masyarakat. Peristiwa erupsi Merapi tahun 2010 menjadi salah satu peristiwa bencana yang menjadi pelajaran bagi pemerintah, untuk memperhatikan integrasi gender dalam sistem dan kebijakan penanggulangan bencana (PB) di Indonesia. Desa Kepuharjo di Kecamatan Cangkringan Sleman merupakan salah satu daerah rawan bencana yang terkena dampak erupsi Merapi 2010 terparah.*

*Pemerinta Daerah (Pemda) Istimewa Yogyakarta melalui lembaga PB BPBD Kabupaten Sleman, menginterasikan perspektif gender sebagai perwujudan pengarusutamaan gender dalam sistem PB melalui rencana strategis 2011-2015. Penelitian ini akan menganalisis implementasi pengarusutamaan gender yang dilakukan BPBD Kabupaten Sleman dalam upaya pengurangan risiko bencana pada masyarakat Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta.*

*Kata Kunci: Gender, Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Merapi 2010*

## Pendahuluan

Kesadaran Pengurangan Risiko Bencana (PRB) telah berkembang secara global. Indonesia menjadi bagian dari kesepakatan dalam konferensi tingkat dunia di Kobe, *Hyogo Framework for Action* tahun 2005, terkait komitmen bersama antara pemerintah negara dan internasional, organisasi, masyarakat dan swasta, dan lain-lain dalam PRB (UNISDR 2008). Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara yang rawan berbagai bencana alam karena terletak pada jalur gempa bumi dan gunung berapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di dunia sejak meletus pada 26 Oktober 2010.

Dalam beberapa kasus bencana alam yang sama dapat memberi dampak yang berbeda bagi kelompok gender yang berbeda. Meskipun laki-laki dan perempuan mengalami kerentanan yang berbeda, akan tetapi dalam berbagai kasus bencana, perempuan terkena dampak risiko bencana yang lebih buruk dengan proporsi yang tidak seimbang dibandingkan dengan laki-laki (*Resillience Development Initiative*, 2011).

Pada banyak kasus, perempuan sulit menyelamatkan diri pada saat bencana terjadi, karena dihadapkan dengan tugas sebagai ibu yang harus memastikan keselamatan anggota keluarga mereka yaitu anak, lansia atau orang tua yang menjadi tanggungjawab seorang ibu. Sebaliknya laki-laki yang istrinya meninggal harus mengambil peran gender istrinya. Selain itu, kaum laki-laki yang menjadi korban jiwa dan luka-luka dalam peristiwa erupsi, pada umumnya disebabkan adanya keharusan peran gender laki-laki untuk menjaga ternak, kebun, tanah dan rumah meskipun dalam kondisi terjadi erupsi (*Resillience Development Initiative*, 2011).

Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat berimplikasi pada kaum perempuan (ibu, istri, anak, lansia atau difabel) karena harus menanggung beban gender yang semakin berat, yaitu sebagai sumber kehidupan ekonomi keluarga dan pelindung keluarga yang berakibat

posisi perempuan semakin rentan. Perempuan di sekitar gunung Merapi yang semakin rentan pasca peristiwa erupsi Merapi 2010 tersebut akan terus menghadapi ancaman erupsi Merapi yang akan meletus secara berkala.

Peristiwa erupsi Merapi tahun 2010 telah menjadi salah satu pelajaran penting bagi pemerintahan Indonesia, khususnya Pemda Provinsi DIY dan Pemda Kabupaten Sleman untuk memasukkan perspektif gender dalam setiap kebijakan PB. Sistem PB di Indonesia sebelumnya kurang melibatkan gender dan tidak menganalisis peran-peran gender yang timpang di masyarakat (*Women's Communication and Information Centre*, 2013). Pemda Kabupaten Sleman melalui pembentukan BPBD Kabupaten Sleman, melakukan upaya integrasi gender dalam sistem kebencanaan, yaitu dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 untuk periode 2011-2015: "*Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Sistem PB*" (BPBD Kabupaten Sleman, 2013).

Penyempurnaan terhadap pemenuhan perspektif gender (Renstra) sangat penting dalam PRB, mengingat bencana erupsi Merapi merupakan sebuah siklus bencana alam yang terjadi dua sampai lima tahun-an, sehingga masih terdapat potensi risiko besar seperti peristiwa erupsi Merapi 2010. Desa Kepuharjo merupakan salah satu desa rawan bencana yang memiliki tingkat kerentanan dan potensi bencana erupsi Merapi yang cukup tinggi, karena terletak di kawasan terdekat dengan kawasan bahaya bencana Merapi.

Melalui studi independen ini, peneliti tertarik untuk mengkaji program kebijakan BPBD Kabupaten Sleman apa saja yang didalamnya terdapat perspektif gender, kemudian menganalisis implementasi kebijakan tersebut dengan mengambil sampel dari beberapa warga desa Kepuharjo. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

*Bagaimana pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Sleman?*

## Metodologi Penelitian

### a) Fokus dan Lokasi Penelitian

Penelitian difokuskan pada level Pemerintah Daerah melalui kebijakan Kabupaten Sleman dalam PB berbasis gender yang tercantum dalam Renstra 2011-2015, khususnya pada peningkatan partisipasi perempuan dalam tahapan pra bencana dalam penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Sleman pasca erupsi Merapi 2010 hingga akhir tahun 2014.

Lokasi penelitian ialah pada warga masyarakat di sekitar gunung Merapi di Desa Kepuharjo yang merupakan salah satu desa terparah dari dampak erupsi Merapi 2010. Peneliti akan melakukan riset lapangan terkait implementasi program kerja yang dilakukan BPBD Kabupaten Sleman yang bertempat di Jalan Candi Gebang Beran Tridadi terhadap masyarakat (*field research*). Selanjutnya untuk menjelaskan hubungan kausalitas beberapa variabel dalam masalah penelitian, penelitian ini termasuk pada kategori *explanatory research*.

### b) Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang secara spesifik menggunakan tipe analisis komponensial, yaitu teknik yang digunakan dalam analisis kualitatif untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan kontras satu sama lain (Rachman 2011). Arah analisis tersebut terbagi dalam tiga tahapan, yaitu pemaparan hasil observasi dan wawancara-wawancara, pemilihan hasil observasi dan wawancara, serta menemukan unsur-unsur kontras.

Peneliti berupaya memperoleh data primer dari pihak-pihak terkait, baik berupa data fisik, maupun data hasil wawancara dengan pimpinan dan pegawai BPBD Kabupaten Sleman terkait penerapan kebijakan yang sejalan dengan strategi Renstra dalam peningkatan partisipasi perempuan masyarakat sekitar gunung Merapi,

khususnya di desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta. Data sekunder akan diperoleh melalui metode studi pustaka (*library research*) dari berbagai sumber seperti: buku, jurnal cetak, jurnal *online*, majalah, surat kabar.

#### Tinjauan Pustaka

Artikel berjudul "*What Women Do: Gendered Labor in the Red River Valley Flood*" dipublikasikan dalam *Environmental Hazard* 3 tahun 2001, yang ditulis Dr. Elaine Enarson seorang sosiolog bencana lulusan Universitas Brondon jurusan Penerapan Bencana dan Kondisi Darurat dan juga seorang fasilitator *US Gender and Disaster Resillience Alliance* (Enarson 2001).

Dalam artikel tersebut berisi tentang penelitian Elaine tentang peran perempuan dan posisi perempuan pasca bencana Banjir Di Lembah Laut Merah (*Red River Valley Flood*) di wilayah bagian Utara Amerika pada tahun 1997. Perempuan dianggap sebagai aktor "*backstage*" untuk mengambil alih kesempatan dominasi dalam kondisi darurat. Dengan demikian perempuan memiliki peran yang disebut "*second shift*" yaitu selain di rumah tangga (tradisional), perempuan juga melakukan kegiatan non-tradisional, baik sektor formal maupun informal. Pada tahun 1995 menjadi dekade perkembangan *Natural Disaster Reduction* yang difokuskan pada perempuan sebagai "*keys to preventive*" dengan meningkatkan kapasitas perempuan dalam kondisi darurat. Elaine menganalisis dengan menggunakan berdasarkan *Tipology of Women's Disaster Work* tentang perempuan baik secara tradisional atau kodrati (dalam pekerjaan rumah tangga), dalam organisasi pemerintahan, maupun komunitas. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya melakukan pengembangan dengan meneliti sejauhmana peran perempuan dalam PRB dalam kasus bencana erupsi Merapi yang mungkin akan kembali terjadi.

Dalam sebuah artikel berikutnya berjudul *Resilience Perempuan Dalam Bencana Alam Merapi: Studi di Kinahrejo Umbulharjo*

Cangkringan Sleman Yogyakarta, membahas mengenai pemaknaan perempuan bagaimana mengupayakan *resilience* perempuan di daerah rawan bencana di Desa Kinahrejo Umbulharjo, Cangkringan Sleman (Gafur, Noorkamilah, Halim 2012). Dalam artikel memaparkan pentingnya upaya *resilience* ketika bencana terulang kembali menjadi hal yang dianggap kurang diperhatikan. Namun selama ini pemerintah dan masyarakat hanya fokus pada proses evakuasi, *recovery*, dan rehabilitasi.

Dengan demikian, tulisan tersebut lebih membahas mengenai bagaimana pemaknaan perempuan Kinahrejo terhadap Merapi dan erupsinya dan bagaimana pemaknaan tersebut berimplikasi kepada *resilience* perempuan Kinahrejo terhadap erupsi Merapi? *Resources* seperti apa yang perlu dikembangkan bagi perempuan Kinahrejo untuk *resilience* tersebut? Hal ini terutama, karena ternyata perempuan lebih banyak yang selamat dan bertahan, dibanding laki-laki. Sehingga artikel tersebut kurang mengelaborasi bagaimana peran pemerintah dalam mengakomodasi proses membangun resiliensi masyarakat khususnya perempuan dalam menghadapi ancaman dan bangkit dari bencana yang mungkin akan terjadi kembali.

Peneliti tertarik untuk mengeksplorasi keterkaitan perempuan dalam bencana dan aksi pemerintah melalui agenda PUG sebagai peluang untuk mendukung proses meningkatkan kapasitas perempuan untuk mengurangi risiko bencana.

## Bencana Merapi dan Perubahan Paradigma Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia

Peristiwa erupsi gunung Merapi 2010 merupakan bencana erupsi terbesar gunung meletus sepanjang sejarah di Indonesia:

*“There are lessons learned from every disaster, but Mount Merapi is especially new to us in two sense: first, the eruption this time is actually quite large and extensive compared to what the case has been historically, and secondly, in recent years there’s been an increase in population around the Merapi slopes.”* (World Bank 2010)

Kecamatan Cangkringan merupakan salah satu wilayah yang masuk ke dalam kawasan Rawan Bencana baik KRB I sampai KRB III. Dalam konteks kebencanaan, kawasan Desa Kepuharjo termasuk ke dalam kategori Kawasan Rawan Bencana II dan III (BPBD Kabupaten Sleman 2013). Berdasarkan pengalaman erupsi November 2010, sumber bencana sebagai dampak dari letusan Merapi bagi masyarakat Desa Kepuharjo terdapat di Sungai Gendol. Sungai tersebut diidentifikasi sebagai jalur sungai yang membawa dampak bencana yang paling mematikan sehingga memusnahkan hampir seluruh permukiman yang berada di sekitar jalur sungai (BPBD Kabupaten Sleman 2013).

Peningkatan perhatian tentang PRB dimulai pada dekade 1990 hingga tahun 2008 (UNISDR 2013). Kerjasama dan komitmen internasional terkait upaya PRB terus meningkat. Hal tersebut ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Pengurangan Bencana Dunia (*World Conference on Disaster Reduction*) yang dibentuk tahun 2005 di Kobe atau disebut dengan *Hyogo Conference* (UNISDR2013). Konferensi tersebut berkontribusi untuk mengkaji ulang Strategi dan Rencana Kerja Yokohama (*Yokohama Strategy and Plan of Action for Safer World*) tahun 1994 (UNISDR2013). Konferensi tersebut diselenggarakan PBB melalui sekretariat UNISDR (*United Nation International Strategy for Disaster Reduction*) yang dihadiri delegasi 160 negara.

Indonesia menjadi salah satu dari 160-an negara yang menandatangani Kerangka Aksi Hyogo, melalui pembentukan kebijakan PRB (PRB yang ditetapkan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Rencana Aksi Nasional PRB (RAN-PRB) 2008-2009 (UNISDR2013). Selain itu, peningkatan kesadaran peningkatan upaya PRB tersebut menjadi momentum bagi terbentuknya UU PB (UU No 24/2007) pada tanggal 24 April 2007. Pemerintah Indonesia juga mengalami perkembangan sistem penanggulangan bencana yang ditunjukkan dalam tabel berikut (BNPB2007):

Tabel 1. Perbedaan Sistem Lama dan Sistem Baru Penanggulangan Bencana

No	PERBEDAAN	SISTEM LAMA	SISTEM BARU
1	Dasar Hukum	Bersifat sektoral	Berlaku umum dan mengikat seluruh departemen, masyarakat dan lembaga non pemerintah.
2.	Paradigma	Tanggap Darurat	Mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi
3.	Lembaga	Bakornas PB, Satkorlak dan Satlak	BNPB, BPBD Propinsi, BPBD Kabupaten atau Kota
4.	Peran Masyarakat	Terbatas	Melibatkan masyarakat secara aktif
5.	Pembagian Tanggungjawab	Sebagian pemerintah pusat	Tanggungjawab pemerintah pusat, propinsi dan Kabupaten
6.	Perencanaan Pembangunan	Belum menjadi aspek perencanaan pembangunan	Rencana Aksi Nasional PRB (RAN-PRB) : a. Rencana PB (PRB) b. Rencana Aksi Daerah PRB (RAD PRB)
7.	Pendekatan Mitigasi	Kerentanan	Analisa risiko (menggabungkan antara kerentanan



			dan kapasitas)
8.	Forum kerjasama antar pemangku kepentingan	Belum ada	<i>National Platform</i> (akan) dan <i>Provincial platform</i> (akan)
9.	Alokasi Anggaran	Tanggungjawab pemerintah pusat	Tergantung pada tingkatan bencana
10.	Pedoman PB	Terpecah dan bersifat sektoral	Mengacu pada pedoman yang dibuat BNPB dan BPBD
11.	Keterkaitan dengan tata ruang	Belum menjadi aspek	Aspek bencana sudah diperhitungkan dalam penyusunan tata ruang

Sumber: BNPB 2007

Dalam UU No. 22 tahun 1999, UU No 255 tahun 1999, serta PP No. 25 tahun 2000, memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Pemda (Kota dan Kabupaten), untuk meningkatkan peran kota atau kabupaten sebagai pusat pertumbuhan wilayah penggerak pembangunan, pusat jasa pelayanan dalam segala bidang, serta pusat informasi dan inovasi termasuk dalam hal teknologi mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana (Kemendagri 2010).

Sejak tahun 2003, Pemda Kabupaten Sleman berupaya membentuk lembaga struktural yang mempunyai tugas khusus menangani masalah kebencanaan yang terjadi di wilayah Sleman. Pada tahun 2011 terjadi perubahan lembaga P3BA menjadi Badan PB Daerah (BPBD) berdasarkan Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat daerah (BPBD Kabupaten Sleman 2013).

Seiring dengan pembentukan BPBD, studi PB lebih pada pendekatan PRB (PRB). Yaitu perpaduan antara sudut pandang teknis dan ilmiah dengan perhatian kepada faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik dalam perencanaan PRB (Murtakhamah 2013). Manajemen PB yang dirancang untuk kegiatan PRB dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat merupakan faktor kunci, untuk memperbaiki atau meminimalisir dampak risiko bencana terhadap laki-laki maupun perempuan.

Jumlah bencana kemanusiaan yang disebabkan bencana alam meningkat dua kali lipat setiap dekade sejak tahun 1060-an (Gregg 1992). Hal tersebut memunculkan keterkaitan isu-isu internasional seperti eksplorasi risiko bencana dengan kondisi kekuatan kondisi lokal pemerintahan, masyarakat dan individu suatu wilayah. Salah satu isu sosial yang diangkat menjadi bagian terpenting dalam eksplorasi risiko bencana ialah isu gender.

Pengintegrasian PUG dalam PRB menjadi hal yang penting untuk mendorong perempuan untuk memiliki posisi kunci dalam manajemen, kepemimpinan dan juga dalam pengambilan keputusan program penanganan bencana (Fatimah 2013). Isu gender menjadi kunci utama dalam sistem PB yang penting dalam masyarakat:

*“Gender is a core factor in disaster risk and the reduction of risk. Gender is a central organizing principle in all societies.”* (Fatimah, 2013)

PUG menjadi bagian dari strategi untuk mewujudkan perhatian dan pengalaman perempuan serta laki-laki sebagai dimensi integral dari desain, implementasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan dan program di semua bidang politik, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dan tidak mengabadikan ketidaksetaraan (*Inter-Agency Standing Committee* (IASC) 2006).

PUG dalam PRB merupakan upaya mendorong kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan masyarakat (Fatimah 2013). Dengan membangun relasi gender yang baik memungkinkan untuk memberikan dampak sangat signifikan dalam kehidupan keseharian antara laki-laki dan perempuan, baik dalam situasi sebelum, ketika dan setelah bencana terjadi (Murtakhamah 2013).

Relasi gender yang baik dalam waktu jangka panjang akan dapat membantu upaya pembangunan dan PRB dalam sistem PB. Kewenangan pemerintah terbatas pada pembuatan regulasi dan kebijakan, namun dalam implementasinya diperlukan sinergi dan

keterlibatan pada *stakeholder* dan masyarakat. Diperlukan sinergi antara masyarakat dan pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun Pemda.

### Bentuk Pengarusutamaan Gender dalam Renstra BPBD Kabupaten Sleman

Dalam bidang kebencanaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengintegrasikan PUG dalam visi dan misi Kabupaten Sleman melalui pembentukan Rencana Strategi (Renstra) sebagai dasar pelaksanaan sistem PB BPBD Kabupaten Sleman. Renstra (2011-2015) terdiri dari susunan misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan yang harus dilakukan BPBD Kabupaten Sleman dimulai pada tahun 2011 hingga akhir tahun 2015.

Hal tersebut tercantum dalam visi Kabupaten Sleman 2011–2015 tersebut adalah “*Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing dan berkeadilan gender pada tahun 2015*” (BPBD Kabupaten Sleman 2013). Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan. Salah satu misi Pemda Kabupaten Sleman dalam upaya PUG tercermin dalam “*Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang*” (BPBD Kabupaten Sleman 2011).

Misi kedua merupakan upaya BPBD Kabupaten Sleman dalam “*melindungi masyarakat dari bencana dalam PRB*” yang secara umum dipahami sebagai pengembangan dan penerapan secara luas dari kebijakan-kebijakan, strategi-strategi dan praktik-praktik untuk meminimalkan risiko bencana di masyarakat. Misi tersebut membuka peluang bagi penerapan integrasi PUG melalui kebijakan terhadap masyarakat. Berikut poin penting tentang upaya PUG dalam dokumen Renstra BPBD Kabupaten Sleman (lihat tabel 2) BPBD Kabupaten Sleman 2013.

Tabel 2

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Renstra  
2011-2015 yang Terkait Isu Gender

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Melindungi masyarakat dari bencana melalui PRB	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat di daerah rawan bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui sosialisasi kebencanaan
	Mengurangi kerentanan masyarakat	Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam menghadapi bencana	Meningkatkan ketrampilan masyarakat di daerah rawan bencana terhadap bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam PB	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam PB	Mengikuti sertakan partisipasi perempuan dalam PB	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelatihan PB.

Berdasarkan Renstra tersebut, terdapat beberapa strategi terkait peluang untuk mewujudkan peningkatan partisipasi perempuan sebagai agenda PUG dalam misi melindungi masyarakat dari bencana yang dirangkum peneliti meliputi: meningkatkan pengetahuan masyarakat, meningkatkan keterampilan, dan

mengikutsertakan perempuan dalam PB. Dengan arah kebijakan yang memberikan peluang bagi perempuan dalam meningkatkan kapasitas, kesiapsiagaan dan partisipasi perempuan dalam menghadapi bencana. Tujuan Renstra BPBD ialah untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam mewujudkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 tahun ke depan (BPBD Kabupaten Sleman 2013). Salah satu sasaran kebijakan yang dirangkum terkait dengan sasaran misi kedua Renstra ialah meningkatnya partisipasi perempuan dalam PB.

Pendekatan partisipasi secara tegas ditekankan UU PB No 24 Tahun 2007, pada saat rekonstruksi pasca bencana. Diperlukan pemahaman kebutuhan dan kapasitas antara perempuan dan laki-laki untuk mengurangi konflik gender tersebut:

*“A focus on women alone (rather than gender relations) may lead to women being seen as the primary victims of emergencies, arising in failure to recognize men’s and women’s different needs and capacities, contributing to increased gender conflict.”* (Byrne, Sally 1995)

Upaya mengikutsertakan partisipasi perempuan dalam PB menjadi hal yang penting dalam PUG. Namun intensifikasi perspektif gender dalam manajemen bencana bukanlah upaya melegalkan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan harus mendapatkan perlakuan khusus, akan tetapi menjadi cara untuk mengoptimalkan pemberdayaan perempuan untuk memaksimalkan upaya mengurangi risiko bencana, akibat ketimpangan kerentanan antara perempuan dan laki-laki.

## Analisis Lensa Gender terhadap Implementasi PRB melalui Renstra BPBD Kabupaten Sleman di Desa Kepuharjo

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lensa gender sebagai dasar agar pengarusutamaan gender dapat diterapkan. Penggunaan analisis PUG menggunakan lensa gender dapat menjadi landasan bagi pemerintahan sebagai perumus kebijakan untuk menggunakan analisis gender dengan menggunakan cara yang tepat dan menghindari perbedaan pemahaman perspektif gender. Penggunaan satu alat analisis gender atau lensa gender, sangat penting dilakukan untuk meninggalkan mitos dan prasangka ketika menyusun, menganalisis dan mengevaluasi sebuah program, aktivitas atau kebijakan.

Analisis Lensa Gender tidak hanya menerima dan tidak mempertanyakan peran dan relasi gender, tetapi juga meliputi beberapa hal berikut (Pincha 2008):

### *a. Fokus pada Kebutuhan Gender Strategis dan Praktis Perempuan dan Laki-Laki*

Diperlukan upaya pemenuhan hak kebutuhan yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis. Kebutuhan “strategis” merupakan kebutuhan jangka panjang untuk mengendalikan hidup atas kebutuhan hak atas harta benda, partisipasi politik, menyusun keputusan politik, dan kebutuhan rasa aman di dalam maupun di luar rumah tangga (Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan 1994).

Sementara itu kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan “praktis” lebih pada kebutuhan terkait pangan, perlindungan, air, dan keselamatan. Kebutuhan praktis berfokus pada kondisi langsung perempuan dan laki-laki (Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan 1994). Kebutuhan strategis menyangkut posisi relatif laki-laki dan perempuan dalam relasinya dengan satu dan yang lain, sehingga praktisnya kebutuhan strategis adalah mengenai penyelesaian ketidaksetaraan gender.

BPBD Kabupaten Sleman tidak hanya berupaya mengakomodasikan kebutuhan praktis pada kondisi darurat dan pasca bencana, tetapi juga kebutuhan strategis laki-laki dan perempuan khususnya untuk berpartisipasi dan menjadi sasaran dalam Renstra BPBD tahun 2011-2015 dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam sistem PB. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan strategis perempuan untuk berpartisipasi dalam kelompok masyarakat untuk berperan aktif sebagai aktor dalam upaya PRB, serta memperbaiki relasi gender antara laki-laki dan perempuan pasca bencana Merapi tahun 2010.

b. *Memunculkan Masalah-Masalah Perempuan dalam Kebijakan-Kebijakan, Program-Program dan Pelaksanaan Pembangunan dan Bencana.*

Perempuan sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, disabilitas, dan lansia memiliki kemungkinan berhadapan dengan ancaman risiko bencana yang lebih besar (Pemerintah Desa Kepuharjo 2014). Sehingga semakin banyak upaya pemberdayaan perempuan untuk menghadapi bencana.

Hal tersebut terjadi karena perempuan dalam konstruksi sosial yang menempatkan dirinya di wilayah domestik mengakibatkan perempuan memiliki lebih sedikit akses terhadap sumberdaya, informasi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan (Pemerintah Desa Kepuharjo 2014). Dengan demikian, bencana dan kerentanan dalam bencana bukan terbentuk secara natural, tetapi dikonstruksikan secara sosial. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perempuan lebih rentan dalam bencana karena konstruksi sosial yang terbentuk, diantaranya (Pincha 2008):

- a) *Keterbatasan akses untuk sumber daya, dalam hubungan sosial, mobilitas, dan informasi dan keterampilan*

Perempuan pada masa tanggap darurat bencana menerima dampak yang baik fisik maupun psikologis, karena ketidaksiapan menghadapi bencana.

*“Women tend to lack resources that are essential in disaster preparedness, mitigation, and rehabilitation.”*  
(Aboobacker., K 2011)

Hal tersebut disebabkan karena akses informasi dan mobilitas perempuan lebih terbatas dan menjadikannya semakin rentan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ibu rumah tangga warga Dusun Jambu di Huntap Batur Desa Kepuharjo, saat ditanya mengenai kondisi pada saat evakuasi dan berkali-kali berpindah tempat pengungsian:

*“Semua orang panik, masing-masing berusaha menyelamatkan diri. Waktu kami di barak pertama, kemudian begitu ada bunyi letusan Merapi kedua kalinya kami semua berhamburan keluar nyelamatin diri sendiri sampai ada mobil bantuan kita berebut naik ke pengungsian di Maguwoharjo, pokoknya panik sekali”.*

Kondisi tersebut menjadi alasan tingkat trauma yang tinggi terhadap kelompok-kelompok rentan karena tidak tersedianya akses informasi keterampilan, sehingga menyebabkan kemampuan psikologis yang tidak stabil, dan membuat perempuan semakin rentan.

#### *b) Pembagian Kerja*

Perempuan dan laki-laki memiliki konstruksi sosial gender untuk berkontribusi dalam peran kehidupan. Namun demikian, peran domestik perempuan seringkali dianggap tidak penting dan tidak istimewa dan bersifat kodrati. Sehingga perempuan berada pada subordinasi peran yang menjadikan perempuan berada sebagai aktor *“back stage”*. Hal tersebut lebih jauh membatasi perempuan untuk mengakses informasi dan menyuarakan pendapatnya dalam suatu pengambilan keputusan atau perkumpulan masyarakat.



Dalam menghadapi konstruksi sosial mengenai persepsi hal yang pantas dilakukan laki-laki maupun perempuan dilakukan dengan pembentukkan relasi gender yang baik dan mengikis pembatasan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

*“A gendered division of labor makes many women both frontline responders in the moments of extreme crisis and long-term caregivers to family members impacted by disasters.” (Weisner, 2012)*

Perempuan di sekitar Merapi, terlibat pada sektor ekonomi informal dan agrikultur. Padahal sektor tersebut yang paling sering terkena dampak bencana alam. Sehingga banyak perempuan tidak memiliki sumber pendapatan pasca bencana dan lebih sering bekerja tanpa upah dan mendapatkan keuntungan yang minim.

#### c) *Peran Rumah Tangga (Household Work)*

Perempuan memiliki tugas utama dalam rumah tangga seperti mengurus anak, memasak dan lain-lain. Ketika bencana menghancurkan rumah, menambah peran tanggung jawab perempuan. Beban ekonomi mengurangi kebebasan dan mobilitas untuk mengakses sumber alternatif, mempengaruhi kemungkinan keterlibatan dalam perkumpulan yang minim:

*“Often housing is destroyed during a disaster occurrence, increasing the women’s responsibility to adjust to changes. Inadequate facilities at post-disaster campsites increase the burden of managing these tasks. Added economic burden reduces freedom and mobility to look for alternative sources, affecting any possible bargaining power.” (Weisner, 2012)*

Pada saat kondisi pasca bencana, warga yang mendapatkan kerusakan rumah yang sangat parah dan tidak dapat dihuni kembali dan tidak diijinkan kembali menempati wilayah tersebut, mendapatkan kompensasi rumah di Huntap. Termasuk sebagian besar warga Desa Kepuharjo

yang sebagian besar rumah telah rata dengan tanah. Kaum perempuan mulai ikut menanggung beban sebagai penambah sumber pencaharian, karena lahan yang rusak dan kehilangan suami atau ayah sebagai pencari nafkah keluarga.

c. *Mengarah pada Kebutuhan Pemetaan Gender sebelum Menyusun Strategi Intervensi.*

Pemetaan tersebut dapat mencakup tinjauan terhadap ruang dan keberhakan relatif perempuan dan laki-laki di institusi yang berbeda: keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Kapasitas perempuan yang lebih minim dari pada laki-laki dalam menghadapi bencana, menjadi penyebab perempuan banyak tergoncang dan kurang memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana. Hal tersebut dapat terlihat dalam hasil pemetaan tingkat kapasitas masyarakat laki-laki dan perempuan dengan sampel beberapa warga desa Kepuharjo:

Gambar 1. Diagram Kapasitas Masyarakat Berbasis Gender

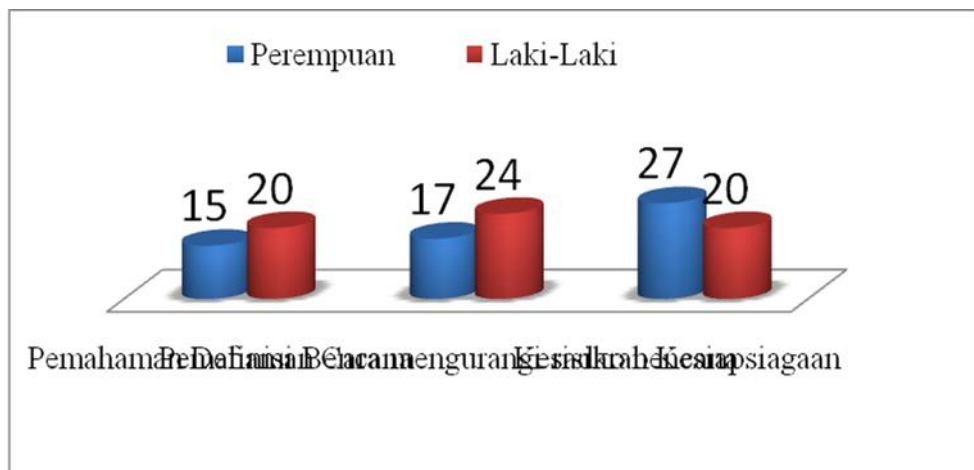


Diagram tersebut menjadi dasar bagi maksimalisasi bagi intervensi PUG dalam sistem PB yang dilakukan BPBD Kabupaten Sleman. Selain itu juga menjadi titik awal dari program-program intervensi gender dalam sistem PB bagi BPBD Kabupaten Sleman melalui Renstra 2011-2015 dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam sistem PB yang diturunkan dari visi dan misi Pemerintahan Kabupaten

Sleman dalam mewujudkan PUG dalam segala bidang pemerintahan.

Hal tersebut juga diintegrasikan dengan adanya keterlibatan perempuan dalam struktur birokrasi pemerintah dan kelompok masyarakat. Dalam struktur organisasi BPBD Kabupaten Sleman, pemetaan gender terkait keterlibatan laki-laki dan perempuan sebagai upaya kesetaraan gender sebagai perwujudan agenda PUG terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Data Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jml	%
1.	I	2	2,94	-	2	2	2,94
2.	II	27	39,71	-	27	27	39,71
3.	III	24	35,29	13	37	37	54,41
4.	IV	2	2,94	-	2	2	2,94

Sumber: Profil dan *Database* BPBD Sleman Tahun 2011

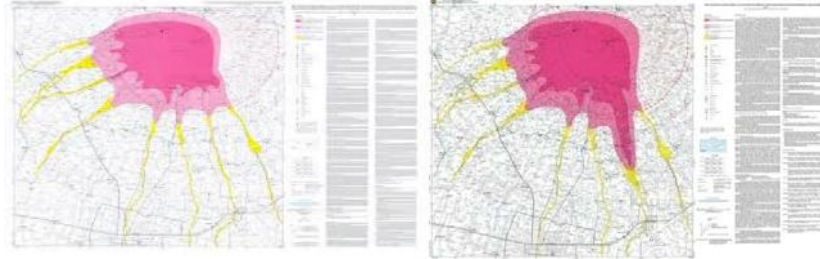
Data tersebut menunjukkan pemetaan kekuasaan gender antara laki-laki dan perempuan dalam struktur organisasi, sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan keterlibatan perempuan untuk mengoptimalkan kebijakan yang berbasis gender sebagai wujud agenda PUG dalam sistem PB di BPBD Kabupaten Sleman.

- d. *Mengidentifikasi Hambatan-Hambatan (Ancaman, Kelemahan, Kerentanan) dan Batu Loncatan (Kekuatan, Kesempatan, kapasitas)*

Ancaman erupsi Merapi memerlukan identifikasi kawasan rawan bencana. Berikut peta kerentanan wilayah yang berhasil diperoleh dari dokumen milik Pemerintahan Desa Kepuharjo

Cangkringan Sleman (BPBD Pemerintah Kabupaten Sleman 2008).

Gambar 3.3  
Peta Kerentanan Wilayah



Sebelum Erupsi Merapi 2010 Setelah Erupsi Merapi 2010

Gambar tersebut menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah erupsi gunung Merapi 2010 terjadi, terlihat kondisi alam dan kondisi sekitar yang berubah akibat adanya bencana dengan cakupan radius kawasan rawan yang semakin luas.

Dalam kaitannya dengan pemetaan berbasis gender, fakta di lapangan menunjukkan bahwa BPBD belum memiliki sistem data terpilah berdasarkan jenis kelamin secara lengkap dan spesifik pada masing-masing daerah dalam mengetahui kerentanan dan kapasitas masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan secara terpisah. Oleh sebab itu, peneliti berupaya mengetahui tingkat risiko bencana berdasarkan jenis kelamin.

Berikut merupakan contoh kasus gambaran korelasi tingkat risiko bencana, ancaman dan kerentanan yang berbasis gender di Kawasan Rawan Bencana (KRB) II dan III di Desa Kepuharjo:

Tabel 4. Hasil Kajian Risiko Bencana Berbasis Jenis Kelamin

KERE	Tinggi		KRB II (P)	KRB III (P)
	Sedang		KRB II (L)	KRB III (L)

	Rendah			
		Rendah	Sedang	Tinggi
		BAHAYA		

■ Risiko Rendah 
 ■ Risiko Sedang 
 ■ Risiko Tinggi

Peneliti menggolongkan tingkat kerentanan dan kapasitas antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa kerentanan khususnya kaum perempuan cenderung masih tinggi karena kapasitas masyarakat perempuan dalam menghadapi bencana masih rendah dan belum menyeluruh.

e. *Mempertimbangkan Langkah-Langkah yang Menghilangkan Kerentanan*

Upaya kesetaraan kapasitas kesiapsiagaan bencana bagi perempuan dan laki-laki diperlukan dalam menghadapi bencana, hal tersebut diawali dengan pembekalan pengetahuan dan informasi tentang bencana, baik secara fisik maupun psikologis, untuk mempersiapkan mental baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pemulihan pasca bencana.

Pada dasarnya sebagian besar masyarakat masih menggantungkan keselamatan dan nasibnya pada pemerintah, baik dalam perencanaan, kesiapsiagaan, masa tanggap darurat maupun pasca terjadi bencana. Salah satu langkah tepat yang dapat dilakukan untuk memunculkan potensi diri dan mengurangi kerentanan ialah dengan meningkatkan kesiapsiagaan diri untuk dapat menghadapi risiko bencana. Yaitu dengan meningkatkan pengetahuan sehingga mampu mengantisipasi bencana sejak masa pra-bencana, darurat bencana hingga pasca bencana.

Upaya memberdayakan perempuan melalui kebijakan BPBD Kabupaten Sleman merupakan bentuk perwujudan

perhatian terhadap kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan rentan untuk mewujudkan upaya PRB:

*“...apakah yang dilatih adalah perempuan saja, tidak. Tapi laki-laki juga. Jadi mainstreamingnya bukan mengkhususkan tetapi menyeimbangkan karena masing-masing punya peran.” “Saya orang yang kurang sependapat, jika melihat perempuan sebagai makhluk yang berbeda, tapi mereka harus dilibatkan dalam struktur yang ada. Jangan sampai ada kelompok perempuan yang membentuk sendiri, sehingga dalam struktur harus melibatkan perempuan.”* (Hasil wawancara Kabid Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sleman)

Diperlukan pemahaman karakteristik kerentanan perempuan dan membuat kebijakan responsif gender merupakan hal yang penting untuk meningkatkan partisipasi dan membangun relasi yang baik dalam komunitas:

*“...for policy interventions that seek to include a participatory component, preliminary discussions that help map the social relationships within the community are essential.”* (Aboobacker., K 2011)

- f. *Pengamatan terhadap Konteks yang Berdampak pada Perempuan dan Laki-Laki secara Berbeda karena Nilai-Nilai Sosial Budaya yang Melekat* Berbagai pemetaan gender tentang keberhakan laki-laki

dan perempuan dalam bidang-bidang terkait isu kebencanaan, justru menunjukkan ketimpangan. Faktor yang menyebabkan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi pemahaman diri yang terkonstruksi untuk dapat berperan pada segala bidang kehidupan meliputi: ketersediaan kesempatan dan akses mobilitas, dedikasi dan kekuasaan, kesempatan politik, akses publik, serta hak kepemilikan yang terbatas bagi perempuan.

Sesungguhnya perempuan dalam bencana sebagai bagian dari kelompok rentan, juga memiliki kesempatan yang cukup tinggi untuk berpartisipasi (BPBD Bantul 2014). Perempuan sebagai bagian dari populasi yang rentan, memiliki peran dan

posisi sosial yang secara langsung dapat mempengaruhi seluruh proses PB, sejalan dengan kutipan berikut:

*“..vulnerable groups include those that find it hardest to reconstruct their livelihoods following the occurrence of disaster, and this in turn makes them most susceptible to the effects of the susceptible to the effects of subsequent hazard event.”* (Weisner, 2011)

Penanaman nilai gender dalam masyarakat tradisional sekitar gunung Merapi dalam hal ini tidak terlepas dari sistem sosial nilai budaya yang telah tertanam dalam masyarakat dalam menghadapi bencana erupsi. Berdasarkan hasil penelitian, para lansia warga Merapi juga memiliki peran serta dalam menghadapi risiko bencana, yaitu sebagai sumber informasi kearifan lokal.

Salah satunya terkait kepatuhan terhadap instruksi Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi, begitu dipercaya sehingga apabila sang juru kunci tersebut belum turun, maka para lansia memberikan informasi dan meyakinkan secara turun temurun bahwa kondisi masih akan aman. Akan tetapi, kepercayaan terhadap kearifan lokal tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar utama upaya evakuasi dari bahaya bencana.

Konteks nilai-nilai sosial budaya lain yang melekat pada perempuan dan laki-laki ialah konteks budaya sosial masyarakat Jawa masyarakat di sekitar gunung Merapi Kabupaten Sleman. Pada situasi di pengungsian, perempuan korban bencana sebagian besar memiliki kesadaran untuk berpartisipasi pada layanan dapur umum. Dapur umum atau dalam bahasa Jawa disebut *rewang sambatan*, telah dianggap secara konstruksi sosial sebagai tugas perempuan, sehingga kebanyakan dilakukan warga perempuan. Sebaliknya pada proses evakuasi secara konstruksi sosial identik dengan tugas laki-laki.

## Kesimpulan

Beberapa kebijakan BPBD Kabupaten Sleman masih buta gender karena tidak mencantumkan laki-laki ataupun perempuan secara khusus, terbukti dari kurangnya kebutuhan data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Sehingga tidak dapat melihat perbedaan-perbedaan gender dalam alokasi peran dan sumber daya. Pembuat kebijakan PB diharapkan tidak netral gender dalam mengimplementasikan kebijakan PB, sehingga menyebabkan kebijakan menjadi kurang spesifik gender. Dengan menambahkan kata “perempuan” dalam kebijakan PB, tidak menjamin perwujudan keadilan kesetaraan gender dapat terwujud dengan baik. Partisipasi perempuan dalam kebencanaan bukan hanya sebagai objek tetapi juga menjadi subjek aktif sebagai agen perubahan (*agent of change*).

## Daftar Pustaka

- Aboobacker, N. P., 2011, 'Gender Mainstreaming in Disaster Management Policies: Indicators to Mitigate Vulnerability of Women', dilihat pada Januari 19, 2014, dari <http://eadi.org/gc2011/aboobacker-323.pdf>.
- Bank, T. W., '*Measuring Merapi's Losses*', dilihat pada 29 Oktober 2015, <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2010/11/24/measuring-merapis-losses>.
- BNPB, 2008, '*Badan Nasional Penanggulangan Bencana*', dilihat pada 4 Desember 2014, dari Perka BNPB 4-2008\_Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.pdf: <http://gitews.org>.
- BPBD Kabupaten Sleman, 2011, 'Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Sleman', dipetik 8 Oktober 2014, dari <http://www.bpbd.slemankab.go.id/>.



BPBD Kabupaten Sleman, 2013, *Profil dan Data Base Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013*, Yogyakarta, Perpustakaan BPBD Kabupaten Sleman.

BPBD Kabupaten Sleman, 2014, *Profil dan Data Base*. Yogyakarta: Perpustakaan BPBD Kabupaten Sleman.

BPBD Pemerintah Kabupaten Sleman, 2008, *Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Perpustakaan BPBD Kabupaten Sleman.

Centre, W. C., 2013, 'Gender and Our Disaster Management', diipetik 1 September 2014, dari kalyanamitra: <http://www.kalyanamitra.or.id/en.tag/disaster/>.

Depari, C. D., 2015, *Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Kawasan Bencana Vulkanik, Studi Kasus: Desa Kepuharjo Cangkringan, Tataloka Journals*, 7.

Detiknews, 2010, 'Mobile Detiknew', dilihat 19 Desember 2014, dari Amuk Merapi Kapan Berhenti?: Merapi, Letusan Terbesar dalam Sejarah Republik: <http://m.detik.com/news/read/2010/11/08/13518/1489336/159/merapi-letusan-terbesar-dalam-sejarah-republik>.

Fatimah, D., 2013, 'Gender Mainstreaming dalam Pengurangan Resiko Bencana', dilihat pada 7 Oktober 2014, dari HYPERLINK "[http://www.academia.edu/2382099/Gender\\_dalam\\_Pengurangan\\_Resiko\\_Bencana](http://www.academia.edu/2382099/Gender_dalam_Pengurangan_Resiko_Bencana)"  
[http://www.academia.edu/2382099/Gender\\_dalam\\_Pengurangan\\_Resiko\\_Bencana](http://www.academia.edu/2382099/Gender_dalam_Pengurangan_Resiko_Bencana).

Gafur, Abdul.W., Noorkamilah., Gazali., Hatim, 2012, 'Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol.1 No 1, dilihat 19 November 2014, dari 'Recilience Perempuan dalam Bencana Alam Merapi: Studi di Kinahrejo Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta': <http://diligib.uin->

suka.ac.id/139/1/welfare%20Vol%201%20No1%20Januari%20-%20Juni%202012%20CHAPTER%203.pdf.

Gregg, 1992, *Behavioral Foundations of Community Emergency Management*, dalam K. M. Lindell, & W. R. Perry, *Washington China Habitat International*, Washington, Hemisphere Publishing Corp.

Heru Saptono (Kabid Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sleman), tentang *Perempuan dalam Pengurangan Risiko Bencana*, di Kantor BPBD Kabupaten Sleman, diwawancarai pada 20 Januari 2015.

Initiative, R. D. (2011). *Integrasi Rehabilitasi Sosio-Ekonomi Penduduk Setelah Gunung Merapi Tahun 2010 terhadap Perencanaan Pemulihan*. Dipetik Desember 24, 2014, dari prevention web: [http://www.preventionweb.net/files/39757\\_39757wp7wimbardanaetaligrasireha.pdf](http://www.preventionweb.net/files/39757_39757wp7wimbardanaetaligrasireha.pdf).

Inter-Agency Standing Committee (IASC), 2006, 'Community of Practice Gender Training: Women; Girls; Boys & Men - Different Needs Equal Opportunitues', dilihat 9 Januari 2015, dari <http://www/gtcop.unwomen.org>.

Murtakhamah, T., 2013, 'Pentingnya Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pengurangan Resiko Bencana', dilihat 2 November 2014, dari [HYPERLINK "http://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/Titin\\_Murtakhamah"](http://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/Titin_Murtakhamah) [http://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/Titin\\_Murtakhamah](http://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/Titin_Murtakhamah).

Pemerintah Desa Kepuharjo, 2014, *Dokumen Rencana kontijensi Erupsi Merapi Desa tangguh Bencana (DESTANA)*, Daerah Istimewa Yogyakarta, Perpustakaan Kantor Kelurahan Desa Kepuharjo.

Pincha, C., 2008, 'Gender Sensitive Disaster Management: A Toolkit for Practitioners', dilihat 18 Januari 2014, dari <http://www.eldis.org/vfile/uplad/1/document/0812/Gnder%20sensitive%20disaster%20management%20Toolkit.pdf>.

Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, 1994, 'Memenuhi Kebutuhan Praktis dan Kebutuhan Strategis Gender', dilihat 24 Oktober 2014, dari [HYPERLINK "http://www.kalyanamitra.or.id/perpustakaan/index.php?p=show\\_detail&id=3021"](http://www.kalyanamitra.or.id/perpustakaan/index.php?p=show_detail&id=3021)  
[http://www.kalyanamitra.or.id/perpustakaan/index.php?p=show\\_detail&id=3021](http://www.kalyanamitra.or.id/perpustakaan/index.php?p=show_detail&id=3021).

Rachman, F., 2011., '7 Teknik Wawancara', dilihat 2 November 2014, dari [academia.edu](http://www.academia.edu):  
[http://www.academia.edu/4393818/7\\_teknik\\_wawancara\\_sae](http://www.academia.edu/4393818/7_teknik_wawancara_sae).

Resillience Development Initiative, 2011, 'Integrasi Rehabilitasi Sosio-Ekonomi Penduduk Setelah Gunung Merapi Tahun 2010 terhadap Perencanaan Pemulihan, dilihat pada 24 Desember 2014: [HYPERLINK "http://www.preventionweb.net/files/39757\\_39757wp7wimbardanaetaligrasireha.pdf"](http://www.preventionweb.net/files/39757_39757wp7wimbardanaetaligrasireha.pdf)  
[http://www.preventionweb.net/files/39757\\_39757wp7wimbardanaetaligrasireha.pdf](http://www.preventionweb.net/files/39757_39757wp7wimbardanaetaligrasireha.pdf).

The World Bank, 'Measuring Merapi's Losses', dilihat 29 Oktober 2015, dari [HYPERLINK "http://www.worldbank.org/en/news/feature/2010/11/24/measuring-merapis-losses"](http://www.worldbank.org/en/news/feature/2010/11/24/measuring-merapis-losses)  
<http://www.worldbank.org/en/news/feature/2010/11/24/measuring-merapis-losses>.

UNISDR, 2013, 'Resolution Adopted by the General Assembly on 20 December 2013', dilihat pada 3 Oktober 2014, dari [HYPERLINK](#)

"<http://www.UNISDR.org/files/resolutions/>"

<http://www.UNISDR.org/files/resolutions/> .

UNISDR, 2008, 'Gender and Disaster Network', 20 April 2014, dari GDN\_Gendernotes1:

[http://www.gdnonline.org/resources/GDN\\_gendernotees1.pdf](http://www.gdnonline.org/resources/GDN_gendernotees1.pdf).

Weisner, 2011, 'Rethinking Development in an Age of Scarcity and Uncertainty New Values, Voices and Alliances for Increased Resilience', dilihat pada 8November 2014, dari Gender Mainstreaming in Disaster Management Policies: Indicators to Mitigate Vulnerability of Women:  
<http://eadi.org/gc2011/aboobacker-323.pdf>.